

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek merupakan pihak yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek (fasilitator) pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1, Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*) adalah pasar modal di Indonesia, yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penggabungan ini bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kultur bursa yang jauh lebih optimistis (www.antaranews.com). Adapun visi Bursa Efek Indonesia adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Sedangkan misinya adalah menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta *good governance* (www.idx.co.id).

Bursa Efek Indonesia memiliki beberapa indeks saham yang terdaftar di dalamnya. Indeks saham atau *stock indexes* (STODEx) merupakan harga atau nilai dari sekelompok saham yang dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu. Indeks saham menunjukkan indikator pergerakan harga dari seluruh saham yang diwakilinya (Dwipayana dan Wiksuana, 2017). Adapun salah satu indeks saham yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia adalah indeks SRI-KEHATI. Pada 8 Juni 2009, Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI), meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks SRI-KEHATI. SRI adalah kependekan dari *Sustainable and Responsible Investment*. Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan pedoman investasi bagi pemodal yaitu dengan membuat suatu *benchmark* indeks baru yang secara khusus memuat emiten yang memiliki kinerja yang sangat baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta

memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (www.pusatis.com).

Yayasan KEHATI menetapkan 25 (dua puluh lima) perusahaan terpilih yang dianggap dapat memenuhi kriteria dalam indeks SRI-KEHATI sehingga dapat menjadi pedoman bagi para investor. Keberadaan perusahaan terpilih akan dievaluasi setiap 2 (dua) periode dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober, dan setelah terpilih nama-nama dari 25 (dua puluh lima) perusahaan tersebut akan di publikasikan oleh BEI yang dapat dilihat di www.idx.co.id. Tujuan dibentuknya indeks ini adalah untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan terpilih pada indeks SRI-KEHATI yang dianggap memiliki bermacam bentuk pertimbangan dalam usahanya berkaitan dengan kepedulian pada lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat internasional.

Adapun mekanisme pemilihan perusahaan-perusahaan untuk masuk kedalam indeks SRI-KEHATI dapat dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama adalah penapisan awal seleksi negatif dan aspek keuangan. Kemudian pada tahap kedua adalah dengan aspek fundamental (www.kehati.or.id).

Gambar 1.1

Mekanisme Pemilihan Perusahaan Indeks SRI-KEHATI



Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) secara rutin akan memantau komponen saham yang masuk dalam perhitungan indeks. Review dan pergantian saham yang masuk perhitungan indeks SRI-KEHATI dilakukan setiap 6 bulan yaitu setiap awal bulan Mei dan November (www.pusatis.com).

Indeks SRI-KEHATI dipilih oleh peneliti dalam obyek penelitian karena indeks SRI-KEHATI merupakan salah satu jenis indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang merupakan indikator pergerakan harga saham untuk digunakan sebagai pedoman bagi investor dalam berinvestasi terhadap saham, dimana emiten-emiten yang terpilih masuk kedalam indeks SRI-KEHATI merupakan perusahaan yang memiliki kepedulian pada lingkungan, tata kelola perusahaan, peduli terhadap masyarakat sekitar dan manusia, serta memiliki perilaku bisnis dan etika bisnis yang dapat diterima di tingkat nasional dan internasional. Sehingga indeks SRI-KEHATI dipilih peneliti sebagai obyek untuk mengetahui apakah dengan adanya indeks SRI-KEHATI dapat meningkatkan motivasi perusahaan khususnya dalam melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mengungkapkan pelaporan dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tersebut ke dalam suatu laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Dalam indeks SRI-KEHATI, terdapat dua sektor perusahaan, yakni sektor perbankan dan sektor non-perbankan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan perusahaan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI dari sektor non-perbankan. Hal ini dikarenakan bahwa kinerja keuangan sektor perbankan dan sektor non-perbankan tidak dapat di generalisasikan secara umum, karena pada sektor perbankan sebagian besar dana yang dikelolanya adalah dana pihak ketiga. Dalam hal ini dana pihak ketiga secara akuntansi dianggap sebagai liabilitas (hutang). Sebagaimana untuk jenis perusahaan seperti perbankan, asuransi, dan investasi, semakin besar modal pihak ketiga yang mereka kelola, maka kemungkinan untuk mendapat laba usaha juga semakin tinggi (www.kompasiana.com).

1.2 Latar Belakang

Perusahaan secara umum merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha mencapai tujuan tersebut bersama-sama dalam melakukan kegiatan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan yang dilakukan perusahaan dilakukan dalam menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam, dan modal. Sejatinnya, perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan atau laba untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham (*shareholders*) dan kreditur, namun kesadaran publik akan keberadaan suatu perusahaan di masyarakat semakin meningkat. Perusahaan diyakini dapat memiliki dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat seperti dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, hingga meningkatkan pendapatan negara. Namun, selain dapat memberikan dampak positif, perusahaan juga dapat menyebabkan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan seperti polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, pencemaran, dan penipisan sumber daya (Hadi, 2011:1).

Terdapat beberapa contoh kasus terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan dampak dari masalah sosial dan lingkungannya. Seperti pada PT. Sido Muncul sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang berada di sektor industri jamu dan farmasi. Pada tahun 2012, PT. Sido Muncul mengalami kebocoran dinding saluran limbah yang akhirnya masuk ke saluran irigrasi sawah sehingga mengakibatkan beras tercemar limbah dengan berwarna kuning kecokelatan (www.republika.co.id). Pada tahun 2013, perusahaan rekanan PT. Pertamina, yakni PT. Gold Water disinyalir melakukan pencemaran terhadap lingkungan. PT. Gold Water mengalami kebocoran pipa di kawasan sumur bor Tanjung Miring Kabupaten Ogan Ilir yang mengakibatkan tanah terkontaminasi minyak dan merusak lingkungan serta menurunkan estetika (www.postmetroprabu.com). Pencemaran lingkungan berupa polusi udara juga disebabkan oleh salah satu pabrik tripleks milik perusahaan PT. Panply. Pada tahun 2015, masyarakat

mengeluarkan adanya asap yang dikeluarkan oleh pabrik tripleks tersebut yang mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar (www.daerah.sindonews.com).

Dari beberapa contoh kasus permasalahan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dapat menyebabkan reaksi masyarakat seperti dengan memberikan protes dan tuntutan karena telah merusak sumber mata pencaharian, mengganggu kenyamanan dan kelestarian lingkungan, serta dapat mengancam kesehatan mereka. Reaksi negatif dari masyarakat pun berdampak negatif terhadap perusahaan, yakni menurunnya citra perusahaan yang berakibat penolakan atas keberadaan bisnis perusahaan di lingkungan sekitar hingga mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan untuk biaya ganti rugi yang besar. Reaksi negatif tersebut dapat mengganggu keberlangsungan hidup (*going concern*) perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

Adanya kasus dalam masalah sosial dan lingkungan yang terjadi pada beberapa perusahaan menyebabkan keharusan perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan. Hal ini diperkuat oleh regulasi Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, yang mana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adapun Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.4 Tahun 2007 bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut serta dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai wujud tanggungjawab sosial.

Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggungjawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan *social responsibility* merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan (Hadi, 2011:61). Tanggungjawab tersebut meliputi kegiatan yang mencegah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat (termasuk karyawan, pemasok, dan pelanggan) dan lingkungan sekitar perusahaan, dengan kata lain perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*) atau disebut *triple bottom-line performance* (Lako, 2011:4).

Corporate Social Responsibility tidak terlepas dari teori-teori yang mendukung. Beberapa teori tersebut adalah teori legitimasi (*legitimacy theory*), teori *stakeholder* (*stakeholder theory*), dan teori kontrak sosial (*social contract theory*), dimana teori-teori tersebut mendukung adanya *Corporate Social Responsibility*. Teori legitimasi menyatakan bahwa masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan (Hadi, 2011:87). Lain halnya dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal (Hadi, 2011:93). Sedangkan teori kontrak sosial muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselerasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan (Hadi, 2011:95).

Keberadaan perusahaan tidak terlepas oleh peran *stakeholder* baik internal seperti pemegang saham dan karyawan, maupun eksternal seperti kreditor, masyarakat, lingkungan, konsumen, pemerintah, LSM, dan pemasok. Keterlibatan *stakeholder* menuntut perusahaan untuk memberikan informasi secara luas dan

transparan mengenai aktivitas bisnis termasuk aktivitas sosialnya melalui suatu pengungkapan sosial atau dikenal dengan *social disclosure* (Sembiring, 2005).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu laporan perusahaan yang penting untuk dilaporkan. Pengungkapan tersebut berbentuk laporan tanggungjawab sosial yang merupakan laporan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan (*annual report*) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku berakhir (Hadi, 2011:206).

Darwin (2007) dalam Nurkhin (2010) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Pengungkapan tanggungjawab sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang aktivitas perusahaan, bahwa perusahaan bukan hanya mencari laba namun juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya, sehingga perusahaan dapat menjaga keberadaannya di masyarakat (Hadi, 2011). Selain itu, dalam penelitian Zuhroh dan Sukmawati (2003) juga membuktikan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial berpengaruh terhadap *volume* perdagangan saham. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengungkapan atau pelaporan tanggungjawab sosial dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam menarik investor untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Di Indonesia, pemerintah juga memberlakukan peraturan yang mengharuskan perusahaan dalam mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) yang tertuang pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Bab IV Pasal 66 mengenai Laporan Tahunan, pada ayat 2 butir c dijelaskan bahwa Direksi dalam menyampaikan laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya laporan mengenai pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (www.bpkp.go.id).

Peraturan lainnya adalah dari Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjelaskan bahwa laporan tahunan wajib memuat mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (www.ojk.go.id). Namun demikian, peraturan tersebut belum memuat tentang standar-standar mengenai item-item pengungkapan pada *Corporate Social Responsibility*, sehingga terjadinya keleluasaan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang menimbulkan keragaman dalam suatu laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Seiring dengan adanya perkembangan *Corporate Social Responsibility*, terbentuklah suatu kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang dipergunakan dalam rangka mendorong transparansi yang lebih besar, yakni *Global Reporting Initiative*. *The Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan jaringan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan dan pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (www.globalreporting.org). Untuk dapat mendukung harapan dalam mengkomunikasikan secara jelas dan terbuka mengenai keberlanjutan, *Global Reporting Initiative* berkolaborasi dengan *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) dengan meluncurkan sebuah kerangka konsep yang global dan dapat dipercaya dalam melaporkan keberlanjutan yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka konsep yang terbentuk menjadi sebuah pedoman pelaporan keberlanjutan telah direvisi beberapa kali, sehingga pada tahun 2013 terbentuklah pedoman terbaru dari *Global Reporting Initiative* yang merupakan generasi ke-4 atau disingkat G4 (www.neraca.co.id). Dengan menggunakan *Global Reporting Initiative 4* (G4) dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan, diharapkan perusahaan dapat menghasilkan informasi yang andal, relevan, dan terstandarisasi yang dapat digunakan untuk menilai peluang dan risiko, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih matang, baik di dalam perusahaan maupun di antara para pemangku kepentingannya.

Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam

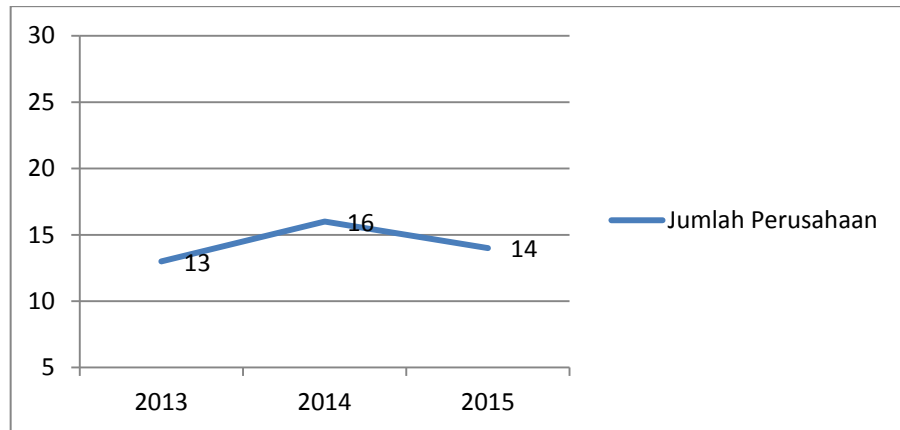
rangka membuat operasi perusahaan berkelanjutan. Sebuah laporan keberlanjutan menyampaikan pengungkapan tentang dampak organisasi baik itu positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan dampak dan pengembangan keberlanjutan terhadap kegiatan dan strategi organisasi (www.globalreporting.org).

Di Indonesia, terdapat *Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA)* yang merupakan bentuk penghargaan untuk perusahaan yang telah membuat pelaporan atas kegiatan yang menyangkut aspek sosial dan lingkungan disamping aspek ekonomi untuk memelihara keberlanjutan perusahaan. Penyelenggaraan *award* yang dilaksanakan setiap tahun ini, yang dimulai sejak tahun 2005, telah meningkatkan kesadaran dunia usaha akan arti penting laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai media untuk menunjukkan level transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi. Salah satu manfaat laporan keberlanjutan adalah untuk memberi keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa investasinya bebas dari risiko lingkungan dan risiko sosial (Sarwono, 2015).

Pengungkapan tanggungjawab sosial menjadi hal yang umum dari sebagian besar perusahaan di Indonesia. Dari data yang peneliti olah untuk perusahaan terpilih dalam Indeks SRI-KEHATI pada periode tahun 2013 hingga 2015 dari 25 perusahaan non-keuangan yang terpilih terdapat 3 perusahaan terpilih Indeks SRI-KEHATI yang tidak konsisten (inkonsisten) dalam melaporkan laporan keberlanjutan perusahaan (*sustainability report*) pada tahun 2013 hingga 2015 dan terdapat 9 perusahaan terpilih Indeks SRI-KEHATI yang secara berturut-turut pada tahun 2013 hingga 2015 tidak melaporkan pengungkapan laporan keberlanjutannya. Fenomena ini sangat disayangkan, karena telah diketahui bahwa Indeks SRI-KEHATI merupakan indeks pada perusahaan terpilih yang berkaitan dengan kepedulian perusahaan pada lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat internasional. Adapun Gambar 1.2 merupakan data jumlah perusahaan yang mengungkapkan laporan tanggungjawab sosial pada laporan keberlanjutan dari perusahaan non-keuangan yang tercatat dalam Indeks SRI-KEHATI pada periode tahun 2013 hingga 2015.

Gambar 1.2

Jumlah Perusahaan Non-Keuangan yang Mengungkapkan Laporan Keberlanjutan Pada Indeks SRI-KEHATI



Dalam beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial (*social disclosure*) juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kinerja keuangan dan struktur kepemilikan suatu perusahaan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Sedangkan struktur kepemilikan merupakan komposisi modal antara hutang dan ekuitas termasuk juga proporsi antara kepemilikan saham *insider shareholders* dan *outsider shareholders* (Haryono, 2005). Kinerja keuangan dan struktur kepemilikan diduga dapat mempengaruhi keluasan pengungkapan tanggungjawab sosial (*social disclosure*) suatu perusahaan. Kinerja keuangan yang telah ada dalam penelitian sebelumnya adalah profitabilitas dan *leverage*, sedangkan struktur kepemilikan meliputi kepemilikan publik. Masing-masing penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan dan struktur kepemilikan memberikan hasil penelitian yang beragam terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial (*social disclosure*). Dalam menilai kinerja keuangan dan struktur kepemilikan publik, penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI periode tahun 2013 hingga 2015, dimana indeks SRI-KEHATI

merupakan indeks dengan 25 (dua puluh lima) perusahaan terpilih yang dianggap dapat memenuhi kriteria dan dapat menjadi pedoman bagi para investor.

Adapun kinerja keuangan yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan dan ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik profitabilitas, maka semakin baik pula tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Fahmi, 2011:135). Salah satu rasio dalam mengukur profitabilitas adalah dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Rasio ini dapat mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada sejumlah aset tertentu (Sari, 2012). Menurut Citraningrum et al. (2014), semakin besar *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan, maka semakin baik penilaian investor terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang cukup penting bagi para investor untuk memberikan informasi kinerja perusahaan. Tingginya angka pada *Return on Asset* (ROA) dianggap sebagai hal yang baik bagi perusahaan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (*social disclosure*).

Adapun fenomena yang peneliti temukan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang berkaitan dengan profitabilitas perusahaan yang tercatat pada Indeks SRI-KEHATI periode tahun 2013 hingga 2015 pada perusahaan non-keuangan. Peneliti menemukan adanya rata-rata profitabilitas yang lebih tinggi dari data perusahaan yang secara tidak konsisten dalam melaporkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dibandingkan dengan rata-rata profitabilitas dari perusahaan yang mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan pada tahun tertentu. Fenomena pengaruh pengungkapan CSR dan profitabilitas pada perusahaan non-keuangan yang tercatat indeks SRI-KEHATI tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Rata-Rata ROA Indeks SRI-KEHATI Non-Keuangan Tahun 2013-2015

| Perusahaan indeks SRI-KEHATI | Rata-Rata ROA | | |
|------------------------------|---------------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Konsisten melaporkan CSR | 0,09652 | 0,07637 | 0,04957 |
| Inkonsisten melaporkan CSR | 0,07557 | 0,06795 | 0,06019 |

Adapun inkonsistensi pada hasil penelitian Purwaningsih dan Suyanto (2015) yang menyimpulkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial (*social disclosure*), sedangkan pada penelitian Primadewi dan Mertha (2014) menyimpulkan bahwa profitabilitas dengan menggunakan *Return on Asset* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Berbeda dengan rasio *leverage*, rasio *leverage* perusahaan juga sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Menurut Martono dan Harjito (2008:295), rasio *leverage* merupakan rasio yang mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Nur dan Priantinah (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi membuat perusahaan perlu melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan secara luas. Hal ini karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berusaha untuk mengurangi sorotan dari debitor sehingga perusahaan dituntut untuk aktif melakukan pengungkapan tanggungjawab sosialnya. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu hutang. Roberts (1992) dalam Sembiring (2003) menggunakan *Debt To Equity Ratio* sebagai proksi untuk menghitung rasio *leverage*, dan memperoleh hasil semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan maka pengungkapan tanggungjawab sosial akan semakin tinggi.

Adapun fenomena yang peneliti temukan mengenai rata-rata *leverage* yang diproksikan oleh *Debt to Equity Ratio*, peneliti menemukan bahwa rata-rata *leverage* tertinggi berada pada perusahaan yang tidak secara konsisten melaporkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Fenomena pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan non-keuangan yang tercatat pada indeks SRI-KEHATI sektor tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Rata-Rata DER Indeks SRI-KEHATI Non-Keuangan Tahun 2013-2015

| Perusahaan indeks SRI-KEHATI | Rata-Rata DER | | |
|------------------------------|---------------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Konsisten melaporkan CSR | 1,31717 | 1,47979 | 1,32242 |
| Inkonsisten melaporkan CSR | 1,42401 | 1,60980 | 1,69223 |

Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih dan Suyanto (2015) menyimpulkan bahwa *leverage* dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursiam dan Gemitasari (2013) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang berhasil membuktikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh atau berpengaruh positif terhadap tanggungjawab sosial perusahaan.

Adapun faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) adalah struktur kepemilikan. Menurut Faisal (2004), struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan direksinya. Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seorang secara individu, masyarakat luas,

pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Tamba dan Chariri, 2010).

Salah satu struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan adalah kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik adalah proporsi saham yang dimiliki publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham dibawah 5% (<5%) yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Hubungan antara kepemilikan saham publik dengan pengungkapan CSR menunjukkan hasil bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham publik, maka semakin banyak informasi tentang perusahaan, dan semakin banyak butir yang diungkapkan pada laporan tahunan serta semakin luas pula pengungkapan tanggungjawab sosialnya (Na'im dan Rakhman, 2005 dalam Sriayu dan Mimba, 2013).

Adapun fenomena yang peneliti temukan mengenai kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah dirilis oleh Bursa Efek Indonesia, perusahaan Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. mengalami peningkatan kepemilikan saham publik dari tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013, perusahaan mencatat kepemilikan saham publik sebesar 35.19%, pada tahun 2014 sebesar 36.81%, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 38.13%. Peningkatan kepemilikan saham publik Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. selama tahun 2013 hingga 2015 tidak mencerminkan adanya pengungkapan tanggungjawab sosial yang juga meningkat. Pada tahun 2013 hingga 2015, Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. mengalami penurunan dalam melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Pada tahun 2013 perusahaan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebesar 35.17%, pada tahun 2014 sebesar 30.77%, dan pada tahun 2015 perusahaan hanya mengungkapkan 27.47%. Penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan

publik terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sudah banyak diteliti. Akan tetapi, terdapat inkonsistensi hasil pada peneliti satu dengan peneliti lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Deva (2016) serta Sriayu dan Mimba (2013) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Indraswari dan Astika (2015) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan publik dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dan mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan struktur kepemilikannya terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga judul penelitian ini adalah **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Kasus pada Perusahaan Indeks SRI-KEHATI Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan pada indeks SRI-KEHATI merupakan jenis indeks yang memiliki kesadaran dan mengutamakan pelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola perusahaan, tetapi dari 25 perusahaan pada indeks SRI-KEHATI hanya terdapat 17 perusahaan yang mengungkapkan CSR sesuai pedoman laporan berkelanjutan tahun 2013 sampai dengan 2015 itupun tidak konsisten melaporkan laporan keberlanjutan hanya ada 13 perusahaan saja yang konsisten melaporkan laporan keberlanjutan.

Pengungkapan tanggungjawab sosial kini menjadi salah satu faktor pendorong naiknya harga saham karena dalam pengambilan keputusan investor saat ini tidak hanya melihat dari segi faktor keuangannya saja tetapi juga dari faktor non-keuangannya karena perusahaan yang mengungkapkan CSR dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan lebih banyak mengungkapkan informasi

laporan perusahaan, oleh karena itu pembahasan pengungkapan laporan tanggungjawab sosial menjadi penting serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial.

Tanggungjawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini menjadi sangat berkembang baik ditingkat regional maupun internasional dan telah menjadi bagian yang sangat penting dalam bisnis. Semua perusahaan yang ingin tetap eksis atau berkelanjutan serta memiliki keunggulan kompetitif harus menjadikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen dari perusahaan yang tidak hanya berupa menyediakan barang dan jasa yang tepat bagi masyarakat tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun fisik (Wahyudi, 2008). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain adalah kinerja keuangan dan struktur kepemilikan perusahaan.

Mekanisme kinerja keuangan dan struktur kepemilikan memberikan keyakinan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Artinya, dengan mekanisme kinerja keuangan dan struktur kepemilikan yang mencukupi, perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan positif, yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak dalam peningkatan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana profitabilitas, *leverage*, kepemilikan saham publik, dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang tercatat Indeks SRI-KEHATI tahun 2013 sampai 2015?
2. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan saham publik secara simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

3. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan saham publik secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR):
 - a. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
 - b. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
 - c. Seberapa besar pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profitabilitas, *leverage*, kepemilikan saham publik, dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI periode tahun penelitian 2013-2015.
2. Untuk pengaruh secara simultan mengetahui profitabilitas, *leverage*, kepemilikan saham publik, dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI periode tahun penelitian 2013-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
 - a. Profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI periode tahun penelitian 2013-2015.
 - b. *Leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI periode tahun penelitian 2013-2015.
 - c. Kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI periode tahun penelitian 2013-2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, akan diperoleh beberapa manfaat yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan antara lain:

a. Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai acuan dasar dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pembahasan mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), khususnya dengan penelitian yang menggunakan variabel kinerja keuangan berupa profitabilitas dan *leverage* serta variabel kepemilikan saham publik.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan indeks SRI-KEHATI dengan pengukuran menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) terbaru yakni versi 4 (G4) khususnya mengenai keterkaitannya dengan kinerja keuangan dan struktur kepemilikan serta sebagai bahan kajian dalam penelitian di masa yang akan datang.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan investor untuk pengambilan keputusan dalam investasi dan memilih perusahaan yang dapat mengembalikan investasi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, tanpa melupakan tanggungjawab sosial perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak perusahaan untuk lebih memahami hubungan antara kinerja keuangan (yang diproksikan dengan profitabilitas dan *leverage*) serta struktur kepemilikan (yang diproksikan dengan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI sehingga dapat

lebih mengantisipasi ataupun memberikan penanganan yang tepat atas kondisi tersebut serta lebih bijak dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel dan Subvariabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor independen. Variabel independen yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu kinerja keuangan (yang diproksikan dengan profitabilitas dan *leverage*) serta stuktur kepemilikan (yang diproksikan oleh kepemilikan saham publik).

1.7.2 Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah perusahaan-perusahaan tidak sejenis yang terdaftar dalam indeks Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan dalam indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun penelitian 2013 hingga 2015.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Periode penelitian menggunakan perusahaan yang tergolong kedalam perusahaan non-keuangan dalam indeks SRI-KEHATI yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun penelitian 2013 sampai 2015.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut adalah sistematika penulisan tugas akhir untuk penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan dan struktur kepemilikan publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang tercatat dalam indeks SRI-KEHATI dengan periode tahun penelitian 2013-2015:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang dijadikan dasar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Ruang Lingkup Penelitian

Bab ini menguraikan teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB III Metode penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pembahasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan sehingga akan jelas gambaran permasalahan yang terjadi dan hasil analisis pemecahan masalah.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.